

Peran Civil Society Di Dalam Mendorong Konsep Dan Praktik Desa Berkemajuan Di Desa Hargomulyo, Kulonprogo, Di Yogyakarta

Bachtiar Dwi Kurniawan¹, David Efendi², dan Husni Amriyanto Putra³

¹ Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, JL Brawijaya Gamping, Bantul, DI Yogyakarta

² Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, JL Brawijaya Gamping, Bantul, DI Yogyakarta

³ Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, JL Brawijaya Gamping, Bantul, DI Yogyakarta

Email: Bachtiar_dk@umy.ac.id

Abstrak

Paper ini menjelaskan bagaimana kekuatan kelompok Civil Society dalam Muhammadiyah yang mendorong penguatan konsep masyarakat berdaya dan unggul berbasis desa. Melalui program yang berkelanjutan, kegiatan pengabdian yang bersifat partisipatif ini digunakan untuk memperkuat pengetahuan terkait politik pangan di aras lokal di DI Yogyakarta. Sebagai komparasi rezim kesejahteraan non negara yang dipelopori Muhammadiyah dilihat sebagai bentuk respon aktual, transformatif dan emansipatif kalangan faith-based civil society. Dengan metode analisis komparatif baik di level diskursif maupun praksis ditemukan beberapa temuan. Pertama, kegagalan rezim kesejahteraan negara tertutup oleh peran peran Civil Society Organization (Muhammadiyah) yang secara grassroot dan relatif sistemik di dalam upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan melalui beragam skema : fllantropi, permodalan ekonomi, dan advokasi. Kedua, potensi besar kolaborasi antar agensi penyedia kesejahteraan untuk membentuk rezim lokal yang lebih stabil, hybrid, resilience dan sustain diperlukan terobosan kebijakan yang pro mustadafin, pro terhadap pembangunan kelompok rentan yang ditengarahi menjadi bagian pokok masalah kemiskinan terbesar di DIY.

Kata Kunci: Sumberdaya, Muhammadiyah, kesejahteraan, Kolaborasi, UMY.

Pendahuluan

Partisipasi Masyarakat dan aktor civil society d alam mewujudkan desa yang tangguh adalah sebuah keniscayaan sebagai bagian dari praktik demokrasi aktual. Desa berkemajuan merupakan konsepsi yang dibangun oleh jurusan Ilmu Pemerintahan sebagai manifestasi dari keberpihakan perguruan tinggi terhadap kepentingan masyarakat di tingkat pedesaan. Desa Berkemajuan memiliki karakter sebagai berikut: Ketaqwaan, Tata kelola pemerintahan yang baik, Peningkatan SDM warga, Partisipasi dan pemberdayaan, Pendayagunaan IT, Pembangunan, infrastruktur yang tepat, Pengembangan potensi desa, Pelestarian kearifan lokal, Peningkatan pemukiman sehat, Pelayanan kesehatan prima, Penguatan ekonomi desa, dan Kemitraan.

Keberadaan asosiasi berbasis suka rela adalah kekuatan sangat penting dalam pembangunan sebuah negara. Alexis de Tocqueville menjelaskan civil society sebagai wilayah kehidupan sosial yang terorganisir dan bercirikan beberapa hal antara lain: kesukarelaan (*voluntary*), keswasembadaan (*self-generating*), keswadayaan (*self-supporting*), kemandirian (*self-resilience*), dan keterikatan dengan norma-norma serta nilai-nilai hukum. Kekuatan senada lainnya juga dikemukakan oleh Robert Putnam sebagai modal sosial yang dapat terdiri dari jaringan sosial, solidaritas, trust, yang dapat memungkinkan terbentuknya *civic culture* yang mampu memperkuat praktik demokrasi bekerja dengan baik.

Nilai-nilai tersebut di atas baik yang dikemukakan oleh Tacqueville atau Putnam merupakan prasyarat utama bagi tegaknya demokrasi substansial—yaitu demokrasi yang seiring sejalan dengan pencapaian kesejahteraan. Pada hakikatnya partisipasi masyarakat dimaknai dengan secara sadar dalam menerima manfaat proses yang dilakukan. Sehingga partisipasi masyarakat memberikan hasil pembangunan yang dikehendaki masyarakat. Proses keterlibatan masyarakat tersebut dapat membangun desa mandiri yang unggul. Salah satu desa berkemajuan yang menjadi pilot project tahun 2018 adalah desa Hargomulyo, Kulonprogo, DI Yogyakarta. Partisipasi masyarakat di Desa ini relative tinggi sehingga perlu diaktualisasikan dan ditingkatkan kapasitasnya untuk menopang kemajuan di masa depan yang berkelanjutan. Meskipun begitu dalam ketercapaian pembangunan desa unggul dan maju masih membutuhkan peran-peran stakholder yang lebih kuat dan terukur. Hal tersebut dikarenakan selain partisipasi masyarakat, peran pemerintah desa dan lembaga desa termasuk karangtaruna sudah merangsang masyarakat untuk ikut terlibat dalam proses pembangunan dengan cara menerapkan model pemberdayaan sesuai masing-masing potensi warga dan lembaga. Karenanya, untuk mewujudkannya dirasa perlu membangun modal kelembagaan penguatan partisipasi warga dengan program sekolah desa berkemajuan.

Posisi desa sebagai ‘obyek’ pembangunan selama ini terbukti meninggalkan banyak cerita pahit ihwal isu-isu kesejahteraan. Desa yang secara retorik dibayangkan sebagai target pembangunan bukan menjadi *center of excellence* justru menjadi tuna kesejahteraan berkepanjangan (*lack of sustainable prosperity*). Banyak persoalan-persoalan hak mendasar (*basic needs*) warga negara justru diabaikan oleh kebijakan selama lebih dari 4 dekade terakhir ini. Karena gelapnya masa depan di pedesaan, trend populasi yang akan tinggal di perkotaan terus meningkat. PBB mencatat penduduk Indonesia tinggal di pedesaan sebesar 40,65% pada tahun 2015 yang secara konsisten terus mengalami penurunan dan memprediksi pada tahun 2045 penduduk Indonesia di pedesaan tinggal sebesar 17,63%. Demikian juga terjadi di belahan bumi lainnya.

Adalah Kyai Haji Ahmad Dahlan yang menunjukkan *concern* sangat kuat akan persoalan sosial dan ekonomi yang melanda bangsa akibat kebijakan kolonial di awala abad XX. Pembangunan kemandirian ekonomi dan ketahanan sosial melalui pendidikan, rumah sakit, lembaga sosial sebagai anti dote dari persoalan mendasar rakyat sekaligus menjadi model

'theologi pembebasan' yang khas Muhammadiyah dengan beragam gagasan 'berkemajuan' di dalamnya. Di usia Muhammadiyah yang melampaui usia 100 tahun, gagasan berkembang ini kembali dirumuskan sebagai bagian dari kontribusi Muhammadiyah meluruskan 'kiblat' pembangunan bangsa. Karena itu Muhammadiyah mempunyai keinginan untuk melihat Indonesia sebagai bangsa yang besar dan bermartabat, banyaknya persoalan bangsa harus bisa diselesaikan secara arif dan bijak, serta merujuk pada kepribadian bangsa yang luhur (Haedar Nashir, 2016).

Muhammadiyah punya komitmen besar atas upaya penyelesaian persoalan bangsa karena Muhammadiyah menjadi bagian tak terpisahkan dari bangsa Indonesia. Sehingga cita-cita Muhammadiyah adalah seiring sejalan dengan cita-cita bangsa Indonesia. Cita-cita Indonesia adalah negara yang makmur, adil dan berdaulat, hal inilah yang menjadi tafsir kontekstual Muhammadiyah untuk menjadi Indonesia yang berkembang. Cita-cita maju inilah yang perlu dirumuskan secara sistematis ke dalam roadmap pembangunan masyarakat pedesaan yang akan diperankan oleh Muhammadiyah dengan memobilisasi segala kekuatan yang ada untuk mendukung negara/pemerintah mewujudkan desa yang maju, unggul, mandiri, dan berdaya tahan (*sustainable*) yang kemudian jurusan Ilmu Pemerintahan UMY labeli sebagai desa berkembang.

Spirit Muhammadiyah adalah berkhidmat untuk bangsa sehingga beragam gagasan penting, mendasar, dan strategis yang pernah disusun oleh Muhammadiyah yaitu buku "Indonesia Berkemajuan: Rekonstruksi Kehidupan Kebangsaan yang Bermakna" (2014) dan buku. "Revitalisasi Visi dan Karakter Bangsa: Agenda Indonesia Ke Depan" (2009) adalah sumbangsih pemikiran untuk menegaskan keberpihakan Muhammadiyah atas upaya-upaya penyelesaian persoalan bangsa. Tulisan ini sebenarnya dalam rangka untuk turut melaksanakan agenda mendesak bangsa yang telah dirumuskan Muhammadiyah dalam locus pedesaan—desa berkembang. Lalu apa dan bagaimana desa berkembang itu?

Metode Pelaksanaan

Peserta kegiatan ini didapatkan dari sistem seleksi berdasarkan komitmen serta kesadaran yang dilakukan oleh pemerintahan desa Hargomulyo. Peserta kegiatan ini sebagian besar adalah pegiat Komunitas dan juga pemuda kampung. Hasil seleksi memutuskan 30 peserta yang mengikuti proses belajar dan praktik pemberdayaan lingkungan selama kurang lebih tiga bulan yaitu sejak bulan November sampai Januari 2019 dan follow up aktifitasnya sampai bulan April 2019.

Untuk memperlancar kegiatan pengabdian ini diperlukan adanya pembagian tugas diantara anggota tim. Ketua bertanggung jawab terhadap terselesainya seluruh pekerjaan dan memberikan arahan kepada anggota untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan. Disamping itu juga memberi materi dan sekaligus menjadi dinamisor dalam focus group discussion dalam rangka penyusunan modul pembelajaran penerapan nilai-nilai kemajuan dalam Islam untuk formulasi beragam program pembangunan desa. Menjadi presenter dalam

penyajian hasil pengabdian pada kegiatan seminar hasil dan menulis hasil pengabdian dalam bentuk tulisan yang layak dimuat dalam jurnal. Anggota bertugas melaksanakan kegiatan yang lebih teknis, termasuk didalamnya membuat *Term of Reference* (TOR) kegiatan dan SOP, mengkoordinasikan kegiatan FGD dan pelatihan-pelatihan, serta mempersiapkan data untuk penulisan laporan pengabdian masyarakat. Disamping itu anggota juga mengumpulkan berbagai dokumen administratif dan naratif sebagai bukti dari pelaksanaan pengabdian masyarakat ini.

Tim teknis bertugas untuk menyiapkan segala peralatan dan kelengkapan pada waktu FGD, kelas, workshop, dan training. Disamping itu juga akan melakukan pekerjaan layout maupun menyusun konsep alat peraga pembelajaran.

Tabel 1. Pembagian Kerja

No	Nama	Jabatan	Kepakaran	Tugas
1	Bachtiar Dwi Kurniawan, S.Fil., MPA	Ketua	Ilmu Pemerintahan	mengkoordinasi dengan stakeholder mitra program
3	Husni Amriyanto Putro, S.IP., M.Si	Anggota 2	Ilmu Hubungan Internasional	mengkoordinasikan kegiatan dan partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan
4	David Efendi, S.IP., MA	Anggota 3	Ilmu Pemerintahan	mengkoordinasikan teknis pelaksanaan kegiatan

Sumber : dokumen penulis

Sesuai dengan permasalahan dan potensi yang ada di dusun Kanoman dan Sidorejo, program pengembangan kampung literasi ini akan dilaksanakan melalui beberapa tahap yaitu:

1. Penilaian awal (*initial assessment*) permasalahan yaitu upaya identifikasi permasalahan dilakukan melalui kegiatan observasi dan forum pertemuan dengan stakeholder terkait. Keluaran (*output*) dari kegiatan ini teridentifikasi kekuatan dan juga potensi masyarakat untuk menjadi maju dengan kekuatan literasi.
2. Peningkatan Pengetahuan yaitu berbagai upaya peningkatan pengetahuan tentang permasalahan literasi baik pada kelompok *stakeholder* pembangunan desa agar timbul kesadaran tentang perlunya meningkatkan kapasitas pengetahuan tata kelola sumberdaya desa. Peningkatan pengetahuan dilakukan dengan berbagai aktifitas outdoor. Keluaran dari tahap ini adalah tersusunnya modul pengembangan desa literasi yang aplikatif dengan bertumpuh pada nilai dan praktik:

- a) *Kolaborasi* berarti kehendak dan inisiatif untuk bekerjasama dengan banyak pihak demi perkembangan dan kemajuan bersama-sama.
 - b) *Pemberdayaan* berarti mendayagunakan segala potensi dan kekuatan untuk memberdayakan sumberdaya manusia dan komunitas setempat baik yang tangible maupun yang intangible seperti nilai-nilai modal sosial: kegotongroyongan dan solidaritas sosial.
 - c) *Kreatifitas & Inovasi* diartikan sebagai nilai-nilai positif yang berasal dari olah rasa dan karya yang mewujudkan dalam bentuk-bentuk tindakan baru yang dapat menambah nilai lebih dari barang atau praktik kehidupan masyarakat.
 - d) *Emansipasi* berarti segala upaya bersama untuk menjadikan pengetahuan sebagai alat menghargai orang lain, meningkatkan kemuliaan hidup dan harkat manusia/masyarakat sehingga memiliki daya tahan (*survive*) tinggi untuk mempertahankan nilai-nilai yang diyakini bersama (*collective value*) di dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup di berbagai bidang kehidupan. Pendekatan emansipatoris ini dapat mengupayakan bersatunya keinginan berprestasi tanpa harus mengorbankan ketahanan ekologi dan kebudayaan dalam arti sebenarnya.
3. Pendampingan dan Pemberdayaan. Berbagai kegiatan yang diorientasikan untuk pendampingan dan pemberdayaan sangat perlu dilakukan agar nilai-nilai kesadaran tentang pengelolaan kampung literasi yang merupakan integrasi antara pemangku kepentingan pemerintah dengan masyarakat luas baik yang berada di dalam masyarakat (utama) maupun dari kekuatan luar untuk dapat bekerjasama sebagai mitra yang setara dan memiliki dimensi emansipatoris. Karena dengan demikian, kegiatan strategis kebudayaan yang dimulai dari pengembangan literasi ini dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan (*sustainable improvement*).

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian desa berkemajuan: (1) Pelatihan dan workshop pengelolaan perpustakaan desa dan komunitas dimaksudkan untuk peningkatan pengetahuan masyarakat yang aplikatif, pelayanan dan pusat pembelajaran masyarakat, pusat kreatifitas dan inovasi, dll; (2). Identifikasi kebutuhan pengembangan sektor unggulan pertanian; dan (3). Pengembangan ekonomi inklusif (pemberdayaan difabel). Ketiga kegiatan ini sedang dalam tindak lanjut yang didorong agar diperkuat dalam semester baru sekolah berkemajuan.

Muktamar Muhammadiyah ke-47 merumuskan Indonesia Berkemajuan sebagai “suatu pemikiran yang mendasar dan mengandung rekonstruksi yang bermakna dalam kehidupan kebangsaan bagi terwujudnya cita-cita negara dan bangsa yang maju, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat sejajar dengan bangsa dan negara lain yang telah mencapai keunggulan.” Hal ini menjadi guidance gagasan desa berkemajuan yang diarahkan persis dengan gagasan Muhammadiyah tersebut di atas. Dalam konteks desa, harus ada kerja

kolaboratif untuk membangun (1) kekuatan sosial-politik, (2) potensi sosial-ekonomi, (3) karakter sosial-budaya sebagai pilar desa yang tangguh dan bertumpuh pada kepentingan terbesar warga perdesaan.

Pertama, untuk membangun struktur sosial politik yang baik perlu gagasan pembangunan yang sistemik harus benar-benar dapat dioperasionalkan di lapangan (*applicable*) dan terukur dengan mengambil ide-ide positif pelaksanaan good governance yang dipekerjakan di level desa. Modal sosial di desa harus menjadi modal yang fungsional untuk menggerakkan roda kemajuan dan keunggulan desa. Termasuk, UU desa juga haruslah dilihat sebagai *politics of hope* yang membawa optimisme dan bukan sebaliknya. Ketakutan pengelolaan dana besar dari aspek menegerial dan SDM harus diatasi dengan sistem kerja kolaborasi antara desa, pemerintah, perguruan tinggi, dan organisasi kemasyarakatan—termasuk di dalamnya Muhammadiyah. Dengan spirit ‘golong gilik’ watak politik akan menjadi ramah dan produktif. Untuk memastikan agenda tersebut diperlukan ‘kepemimpinan profetik dan Institusi yang progresif/maju yaitu berperan sebagai *agency* dan katalisator sistem yang saling menopang, saling menguatkan.

Kedua, pembangunan bidang sosial ekonomi merupakan pilar yang sangat penting untuk membawa desa menjadi desa maju yaitu desa yang mandiri atau memiliki ketahanan di bidang pangan, ekologi yang terkendali, dan adanya kegiatan ekonomi masyarakat yang berkesinambungan sesuai potensi yang dimiliki: pertanian, perkebunan, perikanan, industry kreatif, UMKM, dan sebagainya. Potensi pariwisata atau ecowisata yang selain rekreatif juga bernuansa edukatif nampaknya dimiliki oleh banyak desa-desa di Indonesia. Dukungan pemerintah untuk memperkuat koperasi desa atau BUMDes harus menjadi pemicu untuk memulai upaya memperkuat ekonomi di desa. Keberadaan ranting Muhammadiyah atau organisasi yang mempunyai aktifitas ekonomi lainnya yang ada di desa-desa juga menjadi modal besar untuk mewujudkan desa berdaya, unggul, dan berdaya saing. Hal ini sangat mendesak karena praktik persaingan ekonomi pasar semakin kentara dampaknya sampai ke pelosok desa.

Terakhir, untuk melaksanakan pembangunan sektor sosial-budaya, pertama-tama adalah bagaimana membuktikan bahwa kekuatan masyarakat sipil dengan modal sosialnya harus dipercaya sebagai Sumber Nilai Kemajuan yang direpresentasikan dalam pengelolaan lembaga pendidikan yang mencerahkan untuk membangun keadaban publik dalam rangkai mendorong pelaksanaan kegiatan pembangunan yang tepat sasaran, efektif-efisien, berdaya saing tinggi dan berkelanjutan.

Muhammadiyah telah memeras banyak energi untuk melahirkan gagasan besar di tengah pelambatan ekonomi dan involusi politik di dalam negeri. Peran pembangunan manusia dan pelayanan public oleh Muhammadiyah tak dapat disepelekan, namun dari itu semua nampaknya perlu sekali menjadikan pembangunan perdesaan menjadi salah satu agenda mendesak Muhammadiyah yang dapat dilakukan bersama-sama dengan pemerintah. Negara dan Muhammadiyah mempunyai visi yang sama yaitu membangun dan mempertahankan

bangsa ‘unggul, inovatif, dan berdaya saing melalui pembangunan yang bertumpuh pada keunggulan masyarakat desa yang dapat dilihat dari modal kekayaan alam dan modal sosialnya. Masa depan bangsa harus dipastikan dengan memastikan terlebih dahulu masa depan desa-desa.

Untuk mewujudkan desa berkamajuan, tim dari jurusan Ilmu Pemerintahan telah melakukan serangkaian kajian untuk mengerucutkan bagaimana prinsip pembangunan desa berkemajuan dan bagaimana karakter-karakter yang dimiliki oleh desa tersebut. Prinsip dasar pembangunan desa adalah dalam spirit kesadaran, pembelaan, dan pemberdayaan. Spirit tersebut manunggal dengan prinsip demokratis dan keadilan sosial. Segala upaya pembangunan adalah semata-mata dalam rangkah untuk menciptakan sebesar-besarnya kesejahteraan warga desa. Banyaknya persoalan di desa terkait aspek managerial dan prioritas ketika dihadapkan pada *top-down policy* menyebabkan desa tidak optimal dalam upaya memberdayakan dirinya. Banyaknya anggaran terserap untuk pembangunan infrastuktur dan biaya operisional menjadikan desa kembali menjadi ‘obyek’ dan bukan subyek untuk menentukan agenda perubahan (transformasi) bagi dirinya. Besaran dana desa tak mampu membangun desa menjadi desa yang punya reputasi, integritas, dan karakter. Justru, banyak korupsi disinyalir berpotensi merusak kehidupan sosial-budaya di desa. Karenanya, perlu ada karakter yang tegas mengapa, bagaimana, desa harus dibangun.

1. Pendampingan Petani

Sarasehan warga ini merupakan forum bersama untuk menggali atau membangun kesadaran Bersama sebagai penghuni kampung. Di dalam forum ini terbangun beberapa kesepakatan untuk mendukung proses edukasi kesadaran pemuda, dan masyarakat secara umum. Forum ini juga memperbincangkan terkait persoalan banyaknya persoalan di desa terkait aspek managerial dan prioritas ketika dihadapkan pada *top-down policy* menyebabkan desa tidak optimal dalam upaya memberdayakan dirinya. Fakta mengenai anggaran terserap untuk pembangunan infrastuktur dan biaya operisional menjadikan desa kembali menjadi ‘obyek’ dan bukan subyek untuk menentukan agenda perubahan (transformasi) bagi dirinya.

Kebutuhan desa Hargomulyo ini persis dengan pemikiran Muhammadiyah. Mukhtamar Muhammadiyah ke-47 merumuskan Indonesia Berkemajuan sebagai “suatu pemikiran yang mendasar dan mengandung rekonstruksi yang bermakna dalam kehidupan kebangsaan bagi terwujudnya cita-cita negara dan bangsa yang maju, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat sejajar dengan bangsa dan negara lain yang telah mencapai keunggulan.” Hal ini menjadi *guidance* gagasan desa berkemajuan yang diarahkan persis dengan gagasan Muhammadiyah tersebut di atas. Dalam konteks desa, harus ada kerja kolaboratif untuk membangun:

- (1) kekuatan sosial-politik,
- (2) potensi sosial-ekonomi,
- (3) karakter sosial-budaya sebagai pilar desa yang tangguh dan bertumpuh pada kepentingan terbesar warga perdesaan.

Muhammadiyah telah banyak melahirkan gagasan besar di tengah pelambatan ekonomi dan involusi politik di dalam negeri. Namun dari itu semua nampaknya perlu sekali menjadikan pembangunan perdesaan menjadi salah satu agenda mendesak Muhammadiyah yang dapat dilakukan bersama-sama dengan pemerintah. Negara dan Muhammadiyah mempunyai visi yang sama yaitu membangun dan mempertahankan bangsa ‘unggul, inovatif, dan berdaya saing melalui pembangunan yang bertumpuh pada keunggulan masyarakat desa yang dapat dilihat dari modal kekayaan alam dan modal sosialnya. Masa depan bangsa harus dipastikan dengan memastikan terlebih dahulu masa depan desa-desa.

2. Workshop Pengelolaan Perpustakaan Desa

Dua kali workshop yang terbagi menjadi kluster teoritis dan praktik. Workshop ini merupakan kegiatan wajib bagi peserta dan dilaksanakan secara partisipatif baik dalam proses pengambilan keputusan, diskusi, sampai hal hal teknis. Workshop teori terdiri dari beberapa pertemuan diantaranya materinya pemberdayaan desa melalui Pendidikan literasi, perpustakaan desa dan ketahanan warga, inovasi desa. Ada pun workshop praktik meliputi Teknik data base peprustakaan, perpustakaan mobil, digitalisasi.

Workshop ini memiliki nilai strategis antara lain: berguna untuk mengupayakan agar masyarakat Desa berdaya, maka pendidikan dan pembelajaran bagi masyarakat Desa diarahkan untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa. Dalam hal ini Literasi adalah kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Pendalaman Literasi dilakukan dengan cara mendayagunakan sumberdaya pembangunan untuk kegiatan Literasi di Desa sekaligus memanfaatkan hasil Literasi sebagaimana dimaksud untuk meningkatkan kualitas pembangunan Desa.

Kegiatan ini memiliki nilai strategis utama. Pertama, sebagai usaha penyadaran makna penting lingkungan hidup kepada masyarakat. Untuk mewujudkan masyarakat yang sadar akan pentingnya lingkungan hidup maka perlu adanya proses perubahan paradigma dalam masyarakat dalam memandang lingkungan hidup. Perubahan paradigma masyarakat ini dapat dilakukan melalui berbagai cara dimana salah satunya melalui tulisan. Untuk dapat membuat tulisan yang bagus maka kemampuan literasi yang baik menjadi sebuah keharusan. Kemampuan literasi yang bagus akan mempermudah pembaca menangkap dan memahami konteks permasalahan yang ingin disampaikan, dengan memahami konteks permasalahan yang disampaikan maka akan timbul kesadaran untuk ikut serta dalam gagasan yang dibangun penulis.

Kedua, sebagai wahana menyampaikan ide dan gagasan dalam menyuarakan makna penting lingkungan hidup bagi masyarakat dan dampak serta kerugiannya jika lingkungan hidup rusak, saya tertarik untuk belajar pembuatan literasi yang baik dalam bidang ekologi. Peserta warga belajar ini sangat percaya bahwa tulisan atau karya literasi memiliki kekuatan yang dahsyat dalam mempengaruhi persepsi seseorang dan merupakan wahana yang tepat

dalam upaya pencerdasan kehidupan bangsa. Harapannya dari karya tulis nanti, saya dapat ikut serta dalam usaha memperkuat kapasitas warga, dan usaha untuk memberikan kesempatan bagi anak cucu penerus generasi bangsa di masa yang akan datang.

Terakhir, desain keunggulan perpustakaan yang melayani adalah jenis perpustakaan tidak eksklusif hanya untuk membaca, tapi juga melayani masyarakat sesuai kebutuhan. Jadi, masyarakat bisa membaca, kemudian membuat inovasi-inovasi yang akhirnya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat lewat buku yang disediakan perpustakaan. Perpustakaan tidak hanya sebagai tempat membaca atau meminjam buku, tapi fungsinya bisa dikembangkan lagi, seperti pemberdayaan ekonomi atau pengembangan seni budaya dan lainnya

Simpulan

Kolaborasi antar stakeholder merupakan hal mendasar di dalam mengelola sumber daya pedesaan yang tersedia. Kehadiran civil society seperti Muhamamadiyah dan Perguruan tinggi serta civitas akademika adalah sebuah keniscayaan untuk partisipasi yang meluas. Di Muhamamadiyah, catur darma merupakan komitmen yang sangat utama bagi penguatan dan pemberdayaan Komunitas. Catur darma ini diantaranya adalah pengabdian kepada masyarakat sebagaimana yang mewujud dalam program sekolah desa bermajuan yang diharapkan berkelanjutan dengan menyisir berbagai aspek kehidupan secara sistematis, terstruktur, dan bertahap.

Untuk mewujudkan desa berkamajuan, tim dari jurusan Ilmu Pemerintahan telah melakukan serangkaian kajian untuk mengerucutkan bagaimana prinsip pembangunan desa berkemajuan dan bagaimana karakter-karakter yang dimiliki oleh desa tersebut. Prinsip dasar pembangunan desa adalah dalam spirit kesadaran, pembelaan, dan pemberdayaan. Spirit tersebut manunggal dengan prinsip demokratis dan keadilan sosial. Segala upaya pembangunan adalah semata-mata dalam rangkah untuk menciptakan sebesar-besarnya kesejahteraan warga desa. Banyaknya persoalan di desa terkait aspek managerial dan prioritas ketika dihadapkan pada top-down policy menyebabkan desa tidak optimal dalam upaya memberdayakan dirinya. Banyaknya anggaran terserap untuk pembangunan infratstruktur dan biaya operisional menjadikan desa kembali menjadi 'obyek' dan bukan subyek untuk menentukan agenda perubahan (transformasi) bagi dirinya. Besaran dana desa tak mampu membangun desa menjadi desa yang punya reputasi, integritas, dan karakter. Justru, banyak korupsi disinyalir berpotensi merusak kehidupan sosial-budaya di desa. Karenanya, perlu ada karakter yang tegas mengapa, bagaimana, desa harus dibangun.

Dari kegiatan pemberdayaan ini disepakati Bersama untuk kegiatan berikutnya antara lain: Pembinaan usaha rumahan Gula semut, Pemberdayaan Difable, Pemberdayaan pertanian lahan kering, Marketing usaha tani dan rumahan. Untuk itu, daya kolaborasi antara stakeholder menjadi kunci untuk mensukseskan gerakan pengabdian ini terutama sekali keterlibatan civil society berbasis perguruan tinggi Muhamamadiyah dan segenap aktor swasta

lainnya. Public private partnership sangat membantu untuk mengupayakan agenda aksi Bersama yang lebih produktif dan berdaya tahan (sustainable).

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih ini kami sampaikan kepada beberapa pihak. Pertama, kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah mendanai kegiatan ini juga menyediakan dukungan pendampingan kualitas pengabdian yang kami lakukan. Kemudian, kedua kepada jurusan Ilmu pemerintahan UMY yang mendukung sumberdaya manusia yang memadai. Berikutnya dalam pelaksanaan kami berhutang pada beberapa pihak yang turut mensukseskan kegiatan ini antara lain Rumah Baca Komunitas, pemuda Kanoman, Bapak Dukuh, pak RW dan Pak RT, dan peserta kegiatan sekolah pemuda ekoliterasi.

Daftar Pustaka

Buku

- Dwipayana, Aridan Suntoro Eko, 2003, *Membangun Good Governance di Desa*, Institute of Research and Empowerment, Yogyakarta.
- Fakrullah, Zudan, dkk. 2004. *Kebijakan Desentralisasi di Persimpangan*. Jakarta. CV. Cipruy.
- Hanif, Nurcholish. 2011. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta Penerbit Erlangga.
- Jabrohim. 2001. *Menggapai Desa Sejahtera Menuju Masyarakat Utama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan.
- Juliantara, Dadang. 2003. *Pembaharuan Desa, Bertumpu Pada Angka Terbawah*. Yogyakarta. Lappera Pustaka Utama.
- Osborne, David & Gaebler, Ted. (1996). *Mewirauahakan Birokrasi: reinventing Government*. Jakarta: PPM.
- Prasojo, Eko. 2003. *People and Society Empowerment: Perspektif Membangun Partisipasi Publik*.
- Sjafrizal. (2014). *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi*. Depok: Rajawali Press.
- Widjaja, HAW. 2003. *Pemerintahan Desa/Marga*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Jurnal

- Candra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, suwondo, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jurnal Administrasi Publik, vol I, No. 6.
- Joeliono. Drs.1988. *Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Penguatan Otonomi Desa (Studi Kasus tentang Kebijakan Penentuan Besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Banyumas)*. Widya Swara Pada Kantor Diklat Kabupaten Banyumas.

Loekman, Soetrisno. 1988. *Negara dan Peranannya dalam Menciptakan Pembangunan Desa yang Mandiri*. dalam Majalah Prisma No.1. LP3ES. Jakarta.

Regulasi Pemerintah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2005 Nomor: 140/640/SJ perihal Pedoman Anggaran Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah.